

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberkati penulis dalam membuat makalah dengan topik: Memperkokoh peran Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia dalam pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan Indonesia.

Makalah ini dibuat guna melengkapi salah satu syarat dalam pencalonan sebagai Pembantu Dekan I (PDI) periode 2009-2013 di lingkungan FPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Isi makalah ini merupakan gambaran kerangka berfikir penulis dalam mempersiapkan diri untuk mengemban amanah sebagai unsur pelayan birokrasi di lingkungan FPTK Universitas Pendidikan Indonesia.

Semoga makalah ini bermanfaat dan akhirnya atas perkenan dan perhatian panitia pemilihan calon pembantu dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia penulis sampaikan ucapan terimakasih.

Bandung, Februari 2009
Penulis,

Dadang Hidayat M.

MEMPERKOKOH PERAN FPTK-UPI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN INDONESIA

H. Dadang Hidayat M.

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi ini, berpengaruh terhadap praktik organisasi, kepemimpinan, dan manajemen pendidikan. Hal tersebut searah dengan kompleksitas berbagai persoalan kepentingan dan persaingan organisasi pendidikan. Oleh sebab itu FPTK-UPI harus terus mengembangkan pemikiran ke arah pemecahan masalah bidang pendidikan khususnya pendidikan teknologi dan kejuruan.

Tantangan nyata yang dihadapi FPTK-UPI dewasa ini didasarkan pada berbagai aspek, terutama sejalan dengan implementasi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta masa transisi perubahan status UPI dari PTN (Perguruan Tinggi Negeri) menjadi PTBHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negera) melalui PP No.6 Tahun 2004 tertanggal 30 Januari 2004. Tantangan yang dihadapi FPTK-UPI juga didasarkan pada rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional (Renstra Depdiknas) tentang perubahan proporsi jumlah SMK:SMA menjadi 70%:30% pada tahun 2015. Berdasarkan renstra ini, jumlah unit sekolah baru (USB) SMK akan semakin bertambah banyak, yang sampai akhir tahun 2008 ini saja sudah mencapai jumlah 7150 unit. Selain itu tantangan lain yang dihadapi LPTK-PTK adalah: 1) SMK memiliki bidang keahlian sebanyak 34 (tiga puluh empat) dengan jumlah program keahlian sebanyak 138 program. 2) Sasaran pembangunan SMK untuk memproyeksikan lulusannya menciptakan lapangan pekerjaan (berwirausaha) 20%, mendapat pekerjaan dalam negeri sebesar 50% dan mendapat pekerjaan luar negeri sebesar 10% serta melanjutkan ke perguruan tinggi sebesar 10%.

Berkaitan dengan hal tersebut FPTK-UPI dituntut menuju perubahan ke arah pelayanan prima yang bisa memperkokoh perannya dalam mengembangkan pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia. Pelayanan prima tersebut dihasilkan melalui tahapan-tahapan perubahan hasil pemikiran dan konsepsi FPTK-UPI dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan dimulai dari

organisasi, kepemimpinan, dan manajemen. Melalui tahapan ini diharapkan satu sama lain saling berinteraksi dan saling mengisi bahkan tidak saling tumpang tindih, manakala dilihat secara teoretis sistematis. Akan tetapi, perubahan tersebut tentunya sudah menjadi kenyataan yang perlu dihadapi dan disikapi, hal ini termasuk dalam sistem pendidikan di berbagai belahan dunia.

Salah satu pilihan dalam kelangsungan pelayanan pendidikan yang berkualitas berdasarkan kemampuan potensi dan sumber-sumber daya FPTK-UPI, adalah adanya perubahan manajemen ke arah pemberdayaan. Harapan dari adanya manajemen pemberdayaan adalah adanya arah kebijakan fakultas secara kolektif. Secara konseptual, desentralisasi manajemen mempunyai karakteristik: *(1) a decentralized system of governance, (2) high academic expectations, (3) small enrollment and class size, and (4) shared values*. Konsekuensi organisasi FPTK-UPI adalah harus mampu megembangkan ke arah pengakomodasian pihak yang peduli terhadap pendidikan, dengan asumsi bahwa kepedulian yang terjadi dapat tumbuh baik secara alamiah maupun adanya interaksi dari anggota organisasi yang ada.

B. Visi dan Misi

Sejalan dengan filosofi dan paradigma diatas, visi Pembantu Dekan I FPTK UPI periode 2009-2013 adalah sebagai berikut: menjadi fakultas yang produktif dalam menghasilkan Sarjana Pendidikan dan Akhli Madya Teknik, yang bertaqwa, berjiwa kebangsaan, berwawasan global, dengan berpijak pada pilar-pilar kepakaran dan profesionalisme

Misinya adalah: (1) menyelenggarakan pendidikan *pre-service* dan *in-service*, untuk menghasilkan sarjana pendidikan, sarjana teknik, dan akhli madya teknik yang unggul dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mampu melakukan inovasi dalam tata nilai masyarakat; (2) melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan teknologi dan kejuruan; (3) menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan teknologi dan kejuruan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat; (4) berperan aktif sebagai pusat informasi dan diseminasi pendidikan teknologi dan kejuruan; (5) melakukan

kerjasama dengan lembaga lain, instansi pemerintah dan swasta termasuk dunia usaha dan dunia industri dalam upaya pengembangan pendidikan dan keahlian teknologi dan kejuruan.

C. Permasalahan dan Tantangan

Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN), merupakan legalitas otonomi pengembangan organisasi pendidikan, mengandung makna dimana seluruh kebijakan lembaga pendidikan diputuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan kesepakatan. Pimpinan lembaga pendidikan, dituntut mempunyai pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan pendidikan berdasarkan kebutuhan kolektif, antara lingkungan internal dan eksternal.

Guna mencapai tujuan kelembagaan FPTK dalam naungan UPI sebagai PTBHMN, maka FPTK harus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerjanya. Dalam upaya ini, ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi: (1) Belum semua sivitas akademika FPTK-UPI siap untuk meningkatkan kinerjanya, karena belum memahami makna perubahan UPI dari PTN menjadi PTBHMN; (2) Kualitas SDM yang tersedia saat ini belum semuanya sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi jumlah, kualifikasi, dan komitmennya pada peningkatan mutu; (3) Tingkat efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran dan pengelolaan kelembagaan masih rendah; (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada saat ini belum optimal; (5) Kemitraan dengan stake holder masih terbatas dan belum terjalin secara optimal; (6) Sistem tata pamong dalam struktur PNS tidak berdasarkan *merit system*, dengan rentang kendali yang terlalu panjang dan birokratis, sehingga pola *reward & punishment* berjalan lamban. Ini menghambat upaya peningkatan kinerja dan komitmen staf pengajar dan administrasi; (7) Pengembangan potensi mahasiswa dalam bentuk karya tulis, karya inovatif produktif, dan peminatan lainnya kurang optimal.

Berdasarkan pengamatan dan apa yang dirasakan oleh semua pihak selama proses transisi, tampaknya belum dapat dipahami secara seksama dan dihadapi melalui pemikiran strategik secara sistematis, khususnya dalam kontek memperkokoh peran FPTK-UPI dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan

di Indonesia yang berorientasi pada pembinaan akademik dan kemahasiswaan yang bermutu. Sehingga, segala potensi yang ada belum optimal diorientasikan ke arah tujuan pencapaian visi dan misi pasca BHMN, melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang garapan pembinaan akademik.

Kondisi tersebut, tampaknya perlu ada strategik pemetaan dan pendayagunaan dalam upaya terciptanya kokohnya peran nyata FPTK-UPI yang selaras dengan potensi dan aset sumber-sumber daya yang ada sebagai kekuatan kelembagaan. Sumber-sumber daya yang ada, meliputi tenaga dosen yang berkualifikasi, integritas pribadi yang didukung pengalaman memadai, jumlah dan potensi mahasiswa yang memenuhi kelayakan melalui PMDK, UM-UPI, dan SNMPTN, fasilitas pembelajaran yang ada. Hal ini, tentunya dapat diberdayakan secara optimal apabila FPTK-UPI dapat memperkokoh perannya secara sistematis dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia.

D. Strategik Memperkokoh Peran FPTK-UPI

1. Sasaran dalam Memperkokoh Peran FPTK-UPI

Lembaga pendidikan mempunyai independensi dalam segala kebijakan yang dijadikan keputusannya, tidak berarti terlepas dari kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat, namun tidak melepaskan diri dari upaya kerjasama yang harmonis baik di dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan luar. Beberapa komponen yang menjadi sasaran dalam memperkokoh peran FPTK-UPI dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia, meliputi:

a. Tenaga Edukatif

Tenaga edukatif atau para dosen adalah salah satu unsur utama ketenagaan di FPTK UPI. Mereka merupakan penyelenggara langsung kegiatan perkuliahan dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Pada dasarnya ditangan merekalah kadar kualitas aktivitas akademik FPTK UPI dipertaruhkan.

Dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat diperlukan tenaga edukatif yang memenuhi persyaratan tertentu. Oleh sebab itu, pembinaan dosen merupakan garapan prioritas utama sebagai sumber daya strategis yang harus direspons, dalam menciptakan iklim melalui kesepakatan dan kesepakatan dalam menetapkan pemikiran kolektif ke arah budaya mutu

dan dilandasi budaya kampus (ilmiah, edukatif, dan religius). Pengokohan peran FPTK-UPI dalam konteks tenaga edukatif (dosen), dikembangkan berdasarkan Tri Dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian) yang dilandasi oleh budaya mutu dengan dukungan administrasi tingkat fakultas yang memadai.

Selain aspek kuantitas keseimbangan jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa yang dilayani, aspek pembinaan kualitas tenaga edukatif juga merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Desakan kebutuhan akan aspek pembinaan kualitas ini lebih terasa lagi manakala dikaitkan dengan perkembangan kehidupan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang menuntut dunia perguruan tinggi untuk semakin kompetitif. Upaya pembinaan tenaga edukatif ini melalui berbagai kegiatan ilmiah berupa diskusi, seminar, lokakarya, kegiatan penelitian, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Kegiatan-kegiatan ilmiah ini dilakukan dalam lingkungan FPTK-UPI maupun melalui kerja sama dengan pihak lain.

Selain melalui kegiatan-kegiatan ilmiah yang sifatnya penyegaran tersebut, upaya peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga edukatif melalui pendidikan formal juga perlu terus digalakan baik di dalam maupun di luar negeri. Para dosen terus didorong untuk melanjutkan studi sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki lembaga. Melalui upaya tersebut diharapkan angka rasio pendidikan tenaga edukatif S3:S2 dalam lima tahun ke depan adalah 25%:75%, namun demikian dari aspek jumlah masih belum cukup memadai guna mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi kelembagaan.

b. Kepemimpinan Program Studi

Kepemimpinan program studi pada setiap jurusan menjadi tulang punggung terciptanya peran FPTK-UPI yang kokoh, melalui adanya kerjasama antara *civitas academica* (tenaga pengajar, tenaga administrasi dan mahasiswa) yang dicirikan, oleh adanya pola-pola interaksi, hubungan peran, dan berpijak kepada pelayanan yang diberikan kepada peserta belajar dalam hal ini mahasiswa.

c. Pengembangan Bimbingan Akademik

Guna meningkatkan fungsi bimbingan akademik bagi mahasiswa antara lain dengan meningkatkan peran dosen pembimbing akademik dalam meningkatkan keterampilan belajar mahasiswa. Pengembangan kegiatan ini dikoordinasikan dengan UPT Layanan Bimbingan dan Konseling melalui *Student Support Service (3S)* dan *Career Planing Development (CPD)*.

Mahasiswa dapat dijadikan subjek yang diharapkan jadi anggota warga masyarakat yang baik. Dalam negara demokrasi, setiap individu diperkenankan mempelajari berbagai konsep kehidupan akademik secara bebas. Namun demikian, sebagai lembaga pendidikan yang dilandasi budaya kampus (ilmiah, edukatif dan religius), mempunyai kewajiban moral dalam memberikan pelayanan pembimbingan kepada mahasiswa yang mengalami hambatan atau penyimpangan.

Pembimbingan dapat bersifat individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan yang dialaminya. Latar belakang mahasiswa merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam garapan kemahasiswa ditinjau dari dokumentasi univesritas. Latar belakang bisanya dimulai dari latar belakang usia, jenis kelamin, asal pendidikan menengah dan lain sebagainya.

Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan prosedur dan sistematis yang berlaku, biasanya setiap tahun dilakukan untuk revisi. Keadaan mahasiswa, selanjutnya digambarkan secara statistik atau analisis kohort.

Beberapa aspek yang harus menjadi perhatian universitas antara lain :

- (a) Penilaian mahasiswa secara periodik
- (b) Pelaporan hasil belajar
- (c) Profil mahasiswa tingkat program studi
- (d) Efek dan yang diperoleh program studi

d. Sistem Kekeluargaan dalam Kontek Kemahasiswaan

Lembaga pendidikan tinggi dapat menerapkan sistem rumah dalam proses pelayanan pendidikannya. Sebagai lembaga formal dapat menerapkan aturan-aturan yang dapat menyenangkan para peserta didik (mahasiswa), seperti mereka rasakan di lingkungan pendidikan tinggi. Kondisi ini diciptakan

secara sistematis sesuai dengan kebutuhan, apakah di lingkungan universitas atau di luar universitas.

e. Tutorial dan Seminar

Pada tingkat tenaga pengajar perlu dikembangkan pola-pola yang dapat mengembangkan kemampuannya, seperti tutorial dalam proses pengajaran bagi pemula, dan seminar-seminar ilmiah yang dilaksanakan di lingkungan program studi.

Program studi mengembangkan model-model :

- (a) Pengajaran komprehensif,
- (b) Pengajaran laboratorium,
- (c) Metode diskusi atau dialog antar tenaga pengajar
- (d) Pengajaran tutorial
- (e) Pengajaran dan seminar-seminar

f. Kerjasama dengan Pihak Institusi (industri)

Program studi mempunyai kewajiban melaksanakan hubungan kerjasama dengan pihak industri guna mendukung pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di industri melalui magang, sangat menunjang dari aspek teknis dan praktik teoretis yang diperoleh dari hasil perkuliahan. Kata kuncinya, adalah pihak program studi menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis dengan saling menguntungkan.

Uraian yang dikemukakan, tampaknya sangat urgen dalam pengembangan Pendidikan Tinggi yang fokus pada tingkat operasional program Studi.

g. Sistem Informasi Manajemen

Mengkaji realitas sistem informasi manajemen pembelajaran dan akademik saat ini, dapat disimpulkan belum memiliki tingkat kelayakan yang cukup untuk memperoleh informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Meskipun sistem perencanaan, evaluasi, dan monitoring pembelajaran sudah berbasis data komputer, namun alir informasi masih tersendat karena keterbatasan sarana. Akibatnya, pada banyak tingkatan, arus informasi tetap memakai jalur konvensional, termasuk dalam hal diseminasi informasi dan kebijakan pimpinan terhadap level di bawahnya.

Strategi pengembangan sistem informasi dan komunikasi melalui jaringan internet dan intranet, sudah tepat untuk mengantisipasi kecenderungan perkembangan iptek dan globalisasi. Namun demikian, akses harus diperluas, sehingga seluruh elemen dan komponen kelembagaan dapat menggunakan dan memperoleh informasi secara transparan untuk mendukung visi dan misi kelembagaan.

Strategi jangka panjang pengembangan sistem informasi manajemen akademik FPTK, adalah membangun sistem yang didukung oleh sarana, prasarana, dan ketenagaan yang memadai. Strategi ini, juga perlu ditindaklanjuti oleh perubahan perilaku budaya sumber daya manusia, sehingga siap berada pada era pengembangan aktivitas akademik dan ilmiah yang berbasis sistem dan teknologi komunikasi.

2. Prioritas Program

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut di atas, maka prioritas program periode 2009-2013, adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas proses pembelajaran akademik; (2) Meningkatkan mutu, produktivitas, dan daya saing penelitian dosen; (3) Meningkatkan sosialisasi tentang peran, tugas pokok, dan fungsi FPTK UPI sehingga semua civitas akademika dan stake holders memahaminya; (4) Menata ulang pengelolaan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, motivasi, evaluasi, monitoring dan pengendalian didasarkan pada mekanisme partisipasi untuk memperoleh keputusan bersama, meskipun keputusan akhir tetap berada pada posisi garis instruksi yang lebih tinggi; (5) Menyusun perencanaan dan pemanfaatan kebutuhan sarana dan prasarana secara bersama-sama (dosen, pimpinan program studi, pimpinan jurusan, pimpinan fakultas dan staf administrasi); (6) Memotivasi civitas akademika FPTK dengan melakukan peningkatan proses layanan terutama layanan kesejahteraan dan layanan proses belajar mengajar, (7) Berperan aktif dalam menyalurkan aspirasi Dosen, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa dalam pembuatan aturan-aturan di Universitas, terutama dalam pengembangan sistem tata pamong (otonomi dan mekanisme berdasarkan merit system), kesejahteraan, serta pengembangan kurikulum dan

program studi; (8) Mengkoordinir dan mencari beasiswa untuk mahasiswa yang memerlukannya sehingga mempercepat masa studi dan angka drop out mahasiswa; (9) Melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan industri serta instansi pemerintah dan swasta untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi; (10) Dalam rangka BHMN, disamping untuk kepentingan akademik, optimalisasi pemanfaatan fasilitas dilakukan juga untuk pengembangan jasa dan produk yang berorientasi bisnis; (11) Mengembangkan teknologi informasi dalam upaya memperluas jaringan kerjasama dan wawasan sivitas akademika untuk menempatkan FPTK-UPI sebagai Fakultas yang bertaraf nasional dan internasional; (12) Menyusun dan mengembangkan standar mutu serta jaminan mutu di dalam mempersiapkan lembaga dan lulusan memperoleh sertifikasi (BAN, KAN, ISO, Asosiasi Profesi, dll).

3. Kriteria Efektivitas Pencapaian Pengembangan

Untuk mengukur keefektifan pengokohan FPTK-UPI dalam hal ini diperlukan kriteria efektifitas organisasi. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Karakteristik efektivitas program studi adalah (1) lingkungan yang aman, nyaman dan teratur untuk mendukung proses belajar mengajar, (2) misi dan komitmen kerjasama *civitas academica* yang jelas, (3) karakteristik kepemimpinan instruksional yang lugas, (4) iklim belajar yang mendukung bagi mahasiswa untuk mencapai keterampilan yang tinggi, (5) perencanaan dan pelaksanaan yang dapat memberikan hasil belajar mahasiswa, (6) melakukan pemantauan atas kemajuan belajar mahasiswa dan memperbaiki instruksional, dan (7) hubungan kampus dan keluarga yang positif yaitu orang tua memainkan peran penting mendukung misi dasar perguruan tinggi membantu pencapaian tujuan.

Generalisasi dari uraian kriteria keefektifan pengokohan peran FPTK-UPI dalam konteks pembinaan pada tingkat fakultas adalah perlu dibangunnya kelompok-kelompok formal (dosen dengan dosen, fakultas dengan masyarakat), kebutuhan-kebutuhan individu (kebutuhan alat peraga, buku teks, dan kelengkapan kelas), dan tujuan birokrasi (hubungan personal secara

administratif) berperan secara bersama atau saling berfungsi satu sama lainnya. Implementasi kriteria efektifitas program studi ditentukan melalui fungsi-fungsi manajemen yaitu: efektifitas perencanaan dan pengorganisasian, hal ini dikatakan efektif apabila perumusan perencanaan dan pengorganisasian mengikutsertakan seluruh komponen dalam merumuskannya. Keefektifan pergerakan adalah kemampuan ketua program (kepemimpinan yang kuat) untuk memimpin program studi, dan pengawasan adalah terpenuhinya proses yang ditentukan sebelumnya dalam perencanaan sesuai tujuan yang ditetapkan.

E. Penutup

Bertolak dari paparan makalah ringkas ini, dapat kiranya dijadikan suatu pertimbangan dalam upaya percepatan transformasi manajemen akademik dan kemahasiswaan yang dilandasi oleh Tri Darma PT pasca BHMN, melalui pengokohan peran FPTK-UPI dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia berbasis budaya mutu. Semoga bermanfaat dan dapat dirasakan hasilnya secara terukur, terkendali dan terprogram.

F. Pustaka Acuan

- Bldrige., Balckburn.(1986).Evaluating Faculty Performance, in Improving Academic Management (Jedamus, et al). Washington : Jossey-Bass.
- Daryanto Eko. (2000).*Konsistensi Hirarki Borang BAN-PT Dengan Data Lapangan Dan Pengembangan Perangkat Lunaknya*. Bandung :Deserasi ITB
- Gordon A.Richard.(1976). *School Administration: Challange and Opportuniy for Leadership*. Iowa: Wm C.Brown Company Publisher.
- Martawijaya, D. H., & Kuswana, W. S. (2008). *Implikasi kebijakan Proporsi Jumlah SMK dan SMA 70 : 30%*. Makalah disampaikan pada Temu Karya dalam Rangka Konvensi Nasional Aptekindo V di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
- Martawijaya, D.H. (2008). *Program Pengembangan Pendidikan Guru Pendidikan Teknologi dan Kejuruan untuk Mengantisipasi Kebijakan Perluasan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia*. Makalah disampaikan pada 3rd International Education Conference UPI-UPSI di Universitas Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim Perak Malaysia.
- , (2008). *Program Pengembangan Pendidikan Guru Pendidikan Teknologi dan Kejuruan untuk Mengantisipasi Kebijakan Perluasan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (LPTK-PTK) Indonesia di Hotel Quality Manado.

- Pardey David. (1991). *Marketing for Schools, First Published*. London : Kogan Page Limited.
- Prosser Charles. (1965). *The Quality Management*. New York : John Wiley & Sons
- Sanusi Achmad. (1988). *Sistem Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Bandung: IKIP.
- Steers,R.M and Porter,L.W. (1991). *Motivation and Work Behavior*. Singapore: McGraw-Hill International.
- Stoner,J.A.F.,Freeman, R.E. (1994). *Manajemen*. Jakarta : PT.Prenhallindo.
- Sutrisno, J. (2008). *Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan*. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Optimasi Pendidikan Kejuruan dalam Pengembangan SDM Nasional di Fakultas Teknik UNP.
- Thomas J.A.(1970). *The Productive School, A System Analisis Approach, to Education Administrasi*. New York: John Willey & Son,Inc
- . Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 tentang Kurikulum pendidikan Tinggi.
- . Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan edisi 2004.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah.
- . Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).